

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pondok pesantren berfungsi sbagai lembaga pendidikan agama dan lembaga sosial (dakwah). Peran pondok pesantren sbagai lembaga penddikan yang menanamkan nilai-nilai ilmu agama dan kesusilaan diperhatikan para poltisi khususnya yang berasal dari partai politik agama Islam. Dengan demikian Pondok Buntet Pesantren sangat dijunjung tinggi oleh para elite PKB karena Buntet Pesantren berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berdampak pada perolehan suara yang besar.

Keterlibatan kiai sebagai figur sentral pondok pesantren dalam politik harus disikapi dengan serius. Hal ini karena politik Indonesia dipahami penuh dengan fragmentasi sementara, sedangkan kiai dipahami sebagai pribadi dengan misi ketuhanan yang berlaku tanpa batas waktu. Misi moral dan agama sangat berbeda dengan misi moral dan politik. Misi moral dan agama didasarkan pada citra Tuhan, dan politik adalah duniawi. Duniawi yang dimaksud terkait dengan posisi kekuasaan. Maka daripada itu, jika ada politisi yang berhasil mendapatkan misi moral dan politik yaitu mendapatkan posisi kekuasaan yang diinginkan dengan bantuan kiai mereka juga harus bisa memberikan timbal balik dengan membantu misi kiai yaitu moral dan agama. Bantuan yang diberikan seputar kebutuhan misi yang dilakukan oleh kiai.

Politik kiai adalah politik moral, bukan berorientasi pada kekuasaan. Keterlibatn kiai dalam kancah poltik tidak brarti bahwa kiai akan berpartisipasi secara langsung dalam mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden atau calon legislatif. Meskipun kiai masih diperbolehkan berpolitik, namun tidak memiliki orientasi pada kekuasaan, mlainkan bertujuan untuk menanamkan nlai-nlai moral bagi kecerdasan dan pemberdayaan umat dan masyarakat. Kerap kali ketika kiai dalam politik menjadi suatu masalah. Namun, menurut penulis msalahnya terletak pada penggunaan otritas dan legitimasi, bukan pada sifat keterlibatan kiai dalam poltik yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada

“penyalahgunaan kekuasaan” ketika kiai dalam politik?. Selama tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, politik kiai tidak masalah, justru sangat dibutuhkan karena kiai tidak berorientasi pada kekuasaan dan mementingkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul: Relasi Kuasa Antara Pondok Pesantren dan Partai Politik (Studi Kasus Pondok Buntet Pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon 2019). Kesimpulan yang berisi uraian singkat dari hasil penelitian mengenai relasi patron-klien yang terbangun antara partai PKB dan Pondok Buntet Pesantren, saran-saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun. Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan konsep pondok pesantren dan partai politik serta teori patron klien yang dikemukakan oleh James C. Scott (1972) untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa antara Pondok Buntet Pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa serta faktor apa saja yang menjadikan keduanya memiliki relasi. Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

Relasi antara partai politik PKB dan Pondok Buntet Pesantren merupakan bentuk afiliasi yang bersifat individual (anggota partai kepada kiai) tanpa adanya intervensi secara langsung dari partai politik. Bentuk relasi antara partai politik dan pondok pesantren terbangun dikarenakan adanya sebuah ikatan bersifat kekuatan politik yang dimiliki oleh partai PKB yang mengedepankan paham Agama Islam, memberi tempat terhormat kepada tokoh agama, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, berpegang teguh pada tradisi santri, memiliki kesadaran pluralisme yang tinggi, terbuka dan inklusif.

Partai Politik sebagai sistem yang memang harus dilalui oleh basis masa tertentu agar dapat terlibat dalam politik secara aktif, dan sudah menjadi tugas partai politik. Fungsi partai politik terhadap negara dan rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Jika Pondok Buntet Pesantren memiliki ide dan ingin menyalurkannya ke dalam sistem bernegara maka harus melewati partai politik karena Indonesia menganut sistem demokrasi yang idealnya partai politik sebagai penyalur aspirasi. Sebagai partai politik ia juga membutuhkan kader untuk

representatif di pemerintahan diperkuat dengan Buntet Pesantren yang memiliki visi misi serta historis yang cukup erat dalam pembentukan PKB itu sendiri sehingga Buntet Pesantren cukup di prioritaskan. Alurnya Buntet Pesantren bisa memberikan idenya kepada negara melalui PKB dan PKB mendapatkan sumber daya manusia unggul dari stake holder Buntet Pesantren lalu, visi misi yang sama berupa kader untuk melanjutkan estafet kekuasaan partai menjadi mudah. Analoginya sama seperti recruitment pegawai kerja di masyarakat umum yang membutuhkan pegawai dari kerja sama antara si perusahaan atau lembaga dengan pendidikan atau sekolah yang bergerak di bidang dan memiliki visi misi yang sama. Begitu pula PKB yang berideologi partai keagamaan dan berbasis NU pun mencari kader dengan latar belakang yang sama, dengan demikian PKB merapat ke Buntet Pesantren yang lembaga pendidikannya bergerak di bidang agama serta berbasis NU.

Fenomena Patron Klien kerap kali di miripkan dengan fenomena politik elektoral. Namun, dalam penelitian ini penulis mengemukakan sebuah kesimpulan bahwa fenomena yang terjadi dalam penelitian yang penulis lakukan bukanlah fenomena politik elektoral. Menurut Aspinall & Sukmajati (2015) dalam mengkaji fenomena politik elektoral cenderung terdapat faktor partai, dan figur kandidat (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 6). Sedangkan, patron klien sendiri terdapat tiga poin penting yang menjadi dasar hubungan patron-klien. Pertama, adanya timbal balik keuntungan yang tidak seimbang. Kedua, terdapat hubungan yang menjaga loyalitas seperti kesetiaan dan kepatuhan. Ketiga, terdapat hubungan yang intensif antar patron dan klien atau hubungan yang terus menerus (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 4-5). Merujuk pada poin tersebut bahwa terdapat hubungan patron dan klien yang terbangun antara Pondok Buntet Pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana mana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Faktor-faktor yang memengaruhi relasi patron-klien antara partai PKB dengan Pondok Pesantren Buntet antara lain adalah, karena faktor keterhubungan yang sudah terjalin sejak lama, budaya yang selaras, kesamaan ideologi yaitu agama Islam, hubungan timbal balik dari keduanya, kemudian adanya kepentingan, relasi atau hubungan yang tidak terlepas dari unsur saling keterkaitan akan kepentingan. Kenyataan ini sesuai dengan apa yang digagas oleh James Scott di dalam teori

Patron-Klien. Hal ini di mana menurut Scott, patron merupakan individu yang berada dalam kedudukan untuk membantu klien-klien. Menurut Scott dalam teorinya tersebut seseorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi kepada kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya. Fakta penelitian menyimpulkan bahwa sesuatu yang diberikan oleh Pondok Pesantren Buntet sebagai patron adalah basis dukungan kepada klien yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian sebagai klien, partai PKB akan membalas dengan menawarkan bantuan atau perkhidmatan yang diperlukan oleh patron yaitu Pondok Buntet Pesantren.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1. Saran Praktis**

1. Berdasarkan dengan hasil penelitian, penulis dilapangan melihat bagaimana perlunya bagi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan paham agama agar mempunyai relasi politik yang terbangun bukan berdasarkan politik yang bersifat matrealistik tetapi berada pada tataran yang lebih bijak.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai cerminan bagi pondok pesantren dalam membangun sebuah relasi serta penentuan kriteria seorang pemimpin dan pemenuhan hak serta kewajiban dalam kerangka Negara yang Demokratis.
3. Partai Politik dinilai sebagai wadah demokratis, sewajarnya cerminan relasi yang terbangun dari Pondok Buntet Pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa menjadi indikator dalam membangun sebuah relasi politik tanpa adanya syarat yang berlaku.
4. Calon legislatif yang terpilih harus memenuhi janji yang diberikan saat kampanye. Pun harus bisa memberikan timbal balik kepada kiai yang merupakan figur sentral dalam meraup keuntungan suara yang didapat. Karena kontribusi yang diberikan kepada kiai akan dialokasikan kepada umat atau

masyarakat banyak. Agar tidak timbul kekecewaan dari masyarakat umum, dan khususnya warga yang memilih. Juga untuk menjaga relasi kedepannya.

5. Kiai harus bisa menggunakan politik tinggi sebagai acuan tekanan moral ketika pemerintah berhasil memutar roda kanan pemerintah dan nilai-nilai syariat menggerakkan roda pemerintah berupa nilai-nilai agama dari aturan tersebut. Kaitan antara agama dan politik dimasukkan ke dalam penerapan nilai-nilai agama tanpa mengorbankan struktur pemerintahan.
6. Buntet Pesantren harus lebih hati-hati lagi dalam pengambilan keputusan ketika hendak menentukan sikap politiknya, karena keterlibatan dari Buntet Pesantren kedalam ranah politik memiliki dampak yang sangat besar dan tidak sebanding dengan apa yang Buntet Pesantren dapatkan.
7. Dimasa yang akan datang Buntet pesantren dianggap perlu untuk melakukan sebuah revitalisasi peran politik yang menyesuaikan zaman dan pilihan masyarakat yang semakin menuju kearah rasional.

### **5.2.2. Saran Teoritis**

Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa relasi antara Pondok Buntet Pesantren dengan Partai Kebangkitan bangsa bisa dikatakan bentuk relasi yang sangat ampuh untuk menggalang massa. Penulis merekomendasikan kepada mahasiswa pada umumnya, dan khususnya mahasiswa ilmu politik UPNVJ agar lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kita sebagai masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam politik negara.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait relasi kuasa antara Pondok

Pesantren dan Partai Politik dengan melakukan riset pada lebih banyak partai politik, baik partai agama atau partai nasional lainnya, agar data yang didapatkan lebih luas dan menyeluruh serta adanya perbandingan yang dapat dilakukan terkait relasi dari keduanya.

Selain itu, fenomena relasi antara pondok pesantren dengan partai politik merupakan hal yang menarik untuk di teliti. Karena culture patron klien yang terjadi di pondok pesantren seringkali dijadikan saeana sebagai kendaraan basis masa partai politik. Maka dari itu penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan penelitian ini agar dapat menjadi perbandingan atau pendukung ketika nantinya digunakan untuk penelitian relasi kuasa antara pondok pesantren dengan partai politik atau relasi kuasa patron klien.